

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN
NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(ANALISIS PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh :
DEWI AGUSTINA
NPM.1421020137**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya dan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan syarat mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah apa dasar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kegunaan skripsi ini adalah agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti mengenai mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan memperbolehkan mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dalam Islam seorang mantan narapidana dalam Islam diperbolehkan menyalonkan diri sebagai Kepala Daerah dilihat dari tambahan hukumannya. Karena seorang mantan narapidana telah menjalankan hukuman yang telah ditetapkan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Dewi Agustina

NPM : 1421020137

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

FAkultas : Syari'ah

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN
NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (ANALISIS PASAL 7 HURUF
G UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP. 19621022199031002

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP. 196603301992031002

Mengetahui
Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.i
NIP. 19580817199303100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah). Disusun oleh Dewi Agustina, NPM. 1421020137, Jurusan Siyasa Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munasqasah Fakultas Syari'ah pada hari : Senin, 4 Juni 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H.

.....

Sekretaris : Agus Hermanto, M.H.I.

.....

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

.....

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

.....

Dekan



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 1970090119970311002

MOTTO

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nur: 5)¹



¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT.Sinerga Pustaka Indonesia, 2012), h. 215.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

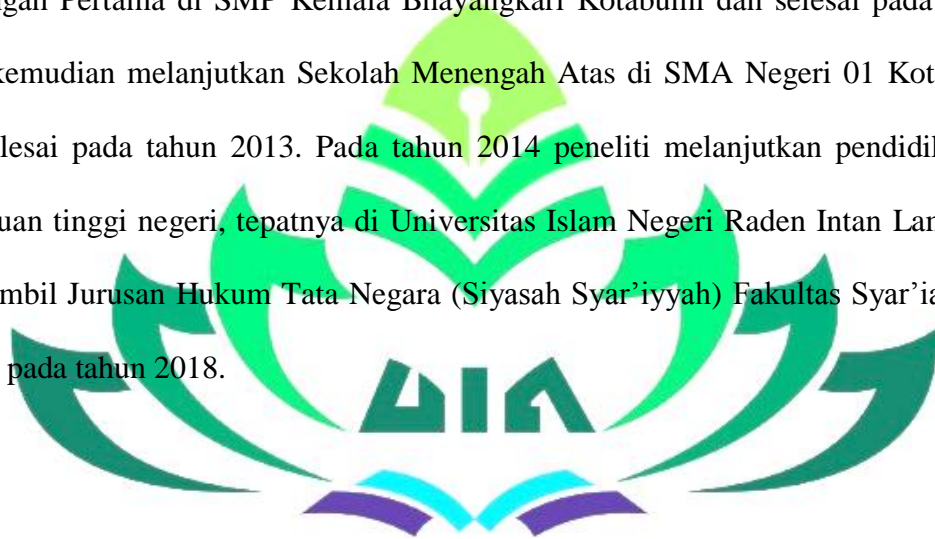
Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Seimbang dan Ibunda Aliyah Djuwita yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi, dan ketulusan do'a.
2. Kakak-kakakku tercinta, Asih Yulia S.Pd.SD, Armawati S.Pd, dan Okta Elfania S.E. yang telah memberikanku inspirasi, motivasi dan semangat.
3. Keponakan-keponakanku tersayang, Varissa Luthfiah Harun, Vanissa Nur Assyifa Harun, dan Valleria Qinnara Putri Harun yang telah memberikanku semangat.
4. Teman-temanku di UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dewi Agustina, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 25 Agustus 1995. Anak keempat dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Seimbang dan Ibu Alyah Djuwita.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Aman Kotabumi pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kemala Bhayangkari Kotabumi dan selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Kotabumi dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syar'iah dan selesai pada tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**. Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

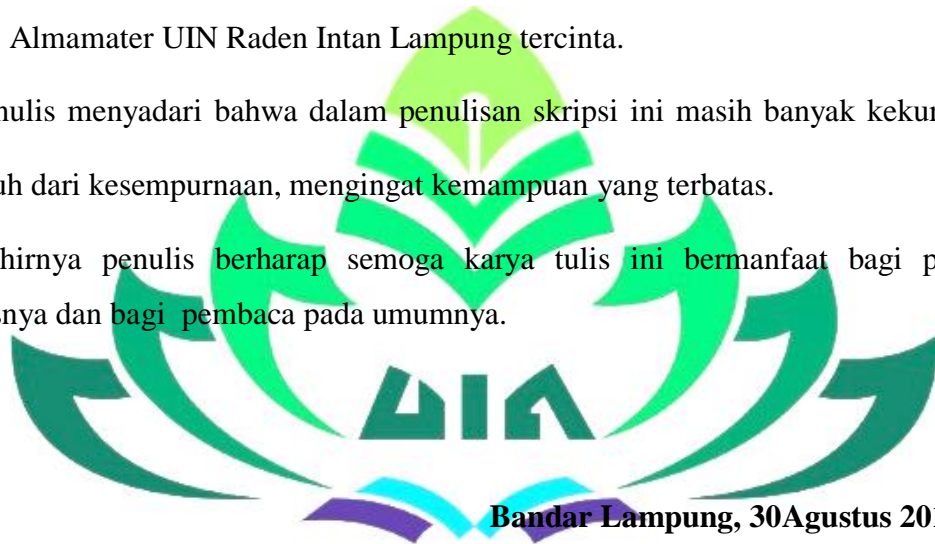
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos., I., Selaku Ketua Jurusan dan bapak Frenki., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. H. Khairuddin, M.H dan Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A Selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan Pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku Fitria Wulandari dan Fitri Apri Yanti yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta membantu dalam meyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 30 Agustus 2017

Dewi Agustina
1421020137

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Narapidana	
1. Pengertian Narapidana.	14
2. Dasar Hukum Narapidana.	15
3. Macam-Macam Narapidana.	20

4. Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam.	22
B. Perihal Mantan Narapidana.....	28
1. Pengertian Mantan Narapidana.	30
2. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana.....	31
3. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana Menurut Hukum Islam.....	32
C. Pemilihan Kepala Daerah	
1. Pengertian Kepala Daerah.....	34
2. Tata Cara Pemilihan Kepala daerah di Indonesia.	37
3. Syarat-Syarat untuk Menjadi Kepala Daerah.....	39

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIII/2015

A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015.....	43
1. Tentang Pokok Perkara.	45
2. Pemohon dan Kepentingan Hukum.	47
B. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pokok Permohonan.....	49
C. Amar Putusan	53

BAB IV ANALISIS

A. Dasar dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.....	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XII/2015 Tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pilkada.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal untuk menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²

Hukum Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, hukum syara'.³

Putusan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil memutuskan.⁴

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 275.

³ *Ibid*, h. 510.

⁴ *Ibid*, h. 1124.

⁵ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006), h. 31.

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁶

Pemilihan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara.⁷

Kepala Daerah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mengepalai suatu daerah.⁸

Dari pengertian-pengertian istilah tersebut, maka yang dimaksudkan dengan judul di atas dapat ditegaskan bahwa suatu hukum Islam yang membicarakan hasil putusan salah satu lembaga negara terhadap orang yang telah menjalani hukuman karena tindak pidana untuk proses atau cara mengepalai suatu daerah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain:

1. Alasan Objektif

Pasal 7 huruf g menyatakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi di sebuah daerah memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus bersih dan tidak cacat secara hukum agar dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya, jika seorang pemimpin saja

⁶Op. Cit. h. 952.

⁷Ibid, h. 1074.

⁸Ibid, h. 671.

sudah pernah memiliki cacat hukum bagaimana dia bisa memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyah.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- c. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah di bawahnya menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan

mengingat dasar pemusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁹

Otonomi daerah tidak akan mengarah kepada disintegrasi negara, sebaliknya otonomi daerah akan lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan pemerataan pembangunan yang sekalipun akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Urusan-urusan yang diserahkan adalah yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kemampuan administrasi pemerintah daerah serta yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam kegiatan pembangunan. Perlu ditekankan bahwa penyerahan urusan kepada daerah otonomi adalah penyerahan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan penyerahan kedaulatan.¹⁰

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berdasarkan asas desentralisasi merupakan kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut asas desentralisasi kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Akan tetapi, dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur

⁹A.W.Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*, cet. Ke-1(Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1998), h. 133-134.

¹⁰*Ibid.*h. 134 et seq..

mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia.¹¹ Kepala daerah tersebut dipilih secara langsung sejak tahun 2005 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan syarat-syarat sebagai berikut sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:¹²

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Telah mengikuti uji publik;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 238-239.

¹²Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Pasal 7 (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, h.8.

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Berhenti dari jabatan bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Adapun pasal 7 diatas terutama di huruf g telah digugat oleh pemohon Jumanto dan Fathor Rasyid untuk permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan calon kepala daerah “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pemohon beranggapan bahwa Undang Undang Pilkada sewenang-wenang dan seolah pembentuk undang-undang menghukum seseorang tanpa batas serta hak antara masyarakat biasa dan mantan narapidana adalah sama dalam pembangunan bangsa Indonesia.¹³

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

¹³“MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada” (On-Line), tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> (28 Maret 2018).

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.¹⁴

Jadi menurut keputusan Mahkamah Konstitusi mantan narapidana dapat mengikuti Pilkada selama mantan narapidana yang bersangkutan terbuka dan jujur di depan publik.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut Patrialis sebagai salah satu yang pro dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah “apabila Undang-Undang membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah sama saja Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan, sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya.”¹⁵ Sedangkan menurut ketua fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini yang merupakan salah satu yang kontra terhadap

¹⁴“putusan MK yang bolehkan bekas narapidana ikut pilkada” (On-Line), tersedia di <https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana-ikut-pilkada> (24 Maret 2018).

¹⁵“MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada” (On-Line), tersedia di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.index>. (28 Maret 2018).

keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah “bila kepala daerah bermasalah dengan hukum akan menjadi ganjalan ketika menjalankan roda pemerintahan daerah, banyak kepala daerah yang awalnya tidak memiliki masalah hukum namun setelah menjabat kepala daerah banyak pula yang tersandung masalah hukum.”¹⁶ Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan tanggapan pro dan kontra maka skripsi ini tertarik untuk mengkaji keputusan tersebut menurut perspektif Hukum Islam. Dengan judul sebagai berikut **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH).”**

D. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah?

¹⁶“pro dan kontra wacana terpidana maju calon kepala daerah” (On-Line), tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57c94d8d48ab1/pro-wacana-terpidana-maju-calon-kepala-daerah> (28 Maret 2018)

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (studi pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁸ Dan deskriptif-analitis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber data primer

¹⁷ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 15.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku fiqh, pendapat para ulama, Undang-Undang, dan pendapat para ahli Undang-Undang tersebut.

b. Sumber data sekunder

Buku-buku yang lain untuk menunjang data primer, antara lain buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sitematika data (*sitematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif dan induktif. Secara deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus. Adapun secara induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu sesuatu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.²²

²¹ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Perasyarakatan.²³ Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).²⁴ Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

Jadi narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah

²³ Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989), h. 333.

²⁴ Op. Cit. h. 952.

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, h.3.

oleh hakim di pengadilan serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya.

Salah satu contoh adanya tersangka korupsi yang mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah yaitu di daerah tulungagung Jawa Timur. Di kota Malang, pasangan Ya'qud Ananda Gudhan dan Ahmad Wanedi memperoleh suara sekitar 16% serta pasangan Mochammad Anton dan Samsul Mahmud memperoleh suara sekitar 30%. Pada Maret lalu, KPK telah menetapkan Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudhan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang pada 2015 lalu.²⁶

2. Dasar Hukum Narapidana

Dasar hukum narapidana terdapat di dalam BAB III bagian pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:²⁷

Pasal 10(1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.

²⁶ “Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih” (On-Line), tersedia di <https://www.bbc.com/Indonesia/amp/Indonesia-44644077> (7 Oktober 2018).

²⁷ *Ibid*, h.7.

(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11 Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

a. pencatatan :

1. putusan pengadilan;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;

b. pemeriksaan kesehatan;

c. pembuatan pasfoto;

d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

a. umur;

b. jenis kelamin;



- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13 Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14(1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16(1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; dan
- d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17(1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.

(2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :

a. penyerahan berkas perkara;

b. rekonstruksi; atau

c. pemeriksaan di sidang pengadilan.

(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.

(7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

3. Macam-Macam Narapidana

Penggolongan narapidana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan penggolongan lebih lanjut diatur dalam keputusan menteri²⁸

- Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:
 - a. Anak, (12 s.d. 18 tahun)
 - b. Dewasa, (di atas 18 th)
- Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:
 - a. Laki –laki
 - b. Wanita
- Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:
 - a. Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B.II b)
 - b. Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
 - c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
 - d. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
 - e. Pidana Mati (Register Mati)
- Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:
 - a. Jenis kejahatan umum
 - b. Jenis kejahatan khusus

²⁸Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 13.

- Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi, seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Artinya, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

4. Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau

gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.²⁹

Sedangkan disyariatkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Penyebab perbuatan yang merugikan di antaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itu memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk dapat mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut.³⁰

Menurut tabiatnya manusia selalu memilih perbuatan yang akan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya daripada kerugiannya, meskipun perbuatan itu merugikan masyarakat. Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang banyak membawa kerugian bagi dirinya daripada keuntungannya akan dihindarinya,

²⁹Rahmat Hakim, *hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 17

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

meskipun perbuatan tersebut menguntungkan masyarakat. Maka dalam hal ini hukuman itulah yang menjadi imbalan bagi tabiat manusia tersebut, karena hukuman tersebut bisa mendorongnya untuk mengerjakan apa yang tidak disukainya, selama perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi masyarakat dan juga bisa menjauhkan mereka dari apa yang disukainya, selama perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.³¹

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah dan Rasulullah SAW yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, h.15.

1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku jenis jarimahya. Diantaranya pelaku ada yang dipenjara selama satu tahun hari dan ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas maksimal adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan lamanya hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan; tergantung harta yang ditahannya

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi

jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa terjadi pada batas minimal.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat juga disebut dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya kekandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh, dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan

yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.

Adapun perihal administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para narapidana terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana; menjadi tanggung jawab *baitul mal* (negara).

Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman ta'zir menjadi 2 yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia. Ia pun

berpendapat: sanksi-sanksi ta'zir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan (qishash dan hudud). Sebagian ada yang merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia, inilah pembagiannya secara umum.

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia Abu Zahrah mengemukakan seperti dalam kasus pembunuhan semi sengaja, disamping adanya kewajiban pemberian diyat oleh pelaku kepada keluarga korban, masih terdapat satu sanksi lagi berupa ta'zir untuk memelihara hak manusia. Demikian pula pemberlakuan hukuman ta'zir dalam masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum qishash.³²

Penghukuman *jarimah* telah ditetapkan dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Hanya saja dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan dasar penegakkan hukum pidana.

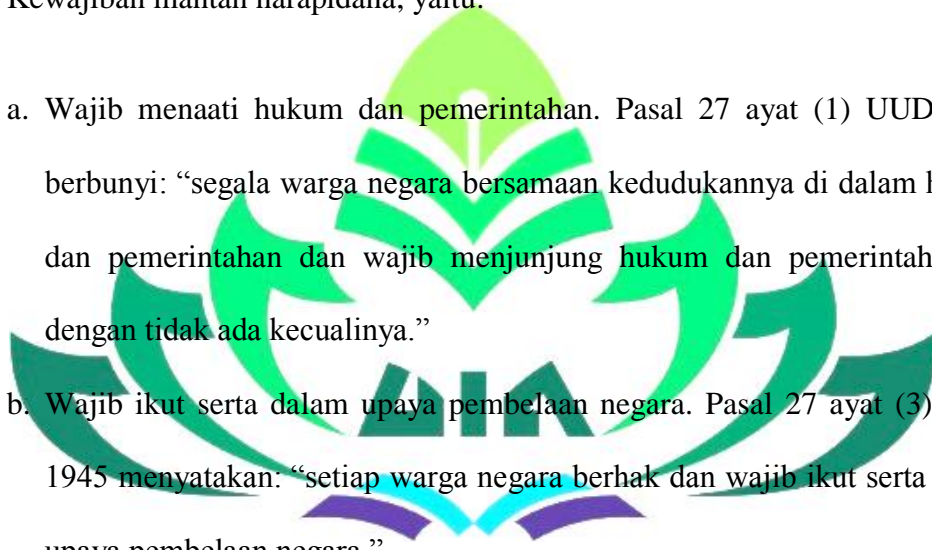
B. Perihal Mantan Narapidana

Setiap manusia secara jelas memiliki HAM yang sama, begitu juga dengan mantan narapidana yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sebagainya.

³² *Ibid*, h.20.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: ”setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”³³ Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di penjara. Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman.

Kewajiban mantan narapidana, yaitu:

- 
- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
 - c. Wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain. Pasal 28J ayat (1) mengatakan: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
 - d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang dengan

³³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 6.

undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

1. Pengertian Mantan Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum Negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Menjalani masa tahanan sebagai narapidana merupakan konsekuensi atas tindakan melanggar hukum. Vonis hukuman sebagai seorang narapidana bertendensi dapat menimbulkan penolakan, rasa frustrasi, tertekan karena kehilangan kebebasannya.

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Kebebasan bisa memunculkan masalah bagi narapidana, sebab narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada di

dalam tempat yang dibatasi ruang lingkupnya, aktivitas yang terbatas, komunikasi terbatas dan segala sesuatu yang terbatas.

Dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

2. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana

Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya menyesali tingkah lakunya dimasa lampau mereka ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Mereka pula ingin memberikan partisipasi sosialnya agar statusnya disamakan dengan anggota masyarakat lainya. Akan tetapi tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ditolak dalam usahanya meningkatkan status kadudukan dan melakukan mobilitas vertikal.

Sebagai akibat dari penderitaan yang terus-menerus maka mantan narapidana biasanya kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan, terulang lagi hukuman dan pemenjaraan sehingga mereka menjadi residivis-residivis yang sukar disembuhkan. Mantan narapidana merasa tidak dihargai oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap mereka sebagai orang jahat.

Oleh sebab itu mantan narapidana ini selalu diombang-ambingkan antara keinginan untuk kembali lagi melakukan kejahatan atau bertahan hidup dengan cacian dan diskriminasi dari masyarakat.



3. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana Menurut Hukum Islam

Akibat hukum bagi mantan narapidana dalam hukum islam dilihat dari beberapa segi ketentuan hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. dari segi ketentuan bentuk dan jumlah hukumannya. Dalam jarimah hudud dan jarimah qishash/diat, ketentuan bentuk dan jumlah hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku ditetapkan oleh syara'. Dalam kaitan dengan ini seorang hakim tidak boleh mengurangi, melebihi, mengubah, memaafkan, dan menggugurkan hukuman

tersebut. Apabila tindak pidana tersebut telah terbukti secara meyakinkan, maka hakim wajib melaksanakan hukumannya. Kecuali dalam qishash atau diat, pihak korban dapat memaafkan hukumannya, baik dengan ganti rugi maupun tidak. Dalam jarimah ta'zir tidak ada sama sekali bentuk dan jumlah hukuman.³⁴

- b. Dari segi pelaksanaan hukuman. Dalam tindak pidana hudud, apabila suatu tindak pidana telah terbukti maka hukumannya wajib dilaksanakan. Demikian juga halnya terhadap tindak pidana pembunuhan, kecuali apabila pihak korban atau ahli warisnya memaafkan. Namun pelaksanaan hukuman dalam tindak pidana ta'zir, menurut jumhur ulama, apabila terkait dengan hak Allah atau hak masyarakat, tidak boleh digugurkan hakim, sekalipun boleh dimaafkan. Bahkan ulama mazhab syafi'i berpendirian bahwa pelaksanaan hukuman dalam jarimah ta'zir tidak wajib bagi hakim. Hakim boleh menerapkan hukumannya dan boleh juga tidak menerapkannya, asal ada kemaslahatan yang menghendaki, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun dengan hak pribadi.
- c. Dari segi diterima atau tidaknya taubat pelaku pidana. Tindak pidana ta'zir bisa gugur dengan taubatnya pelaku pidana. Namun untuk tindak pidana hudud taubat dari pelaku pidana tidak ada pengaruhnya

³⁴ Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 810.

terhadap pelaksanaan hukuman, kecuali terhadap jarimah *al-hirabah* (perampokan), hukuman terhadap hirabah adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang/diasingkan, dan hak pelaku untuk menjadi saksi dalam seluruh kasus dicabut. Hak kesaksian pelaku hirabah bisa dipulihkan kembali apabila ia benar-benar telah bertaubat. Pemulihan hak kesaksian ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. An-Nur : 5.³⁵

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- d. Dari segi hak memilih hukuman yang akan dilaksanakan. Seorang hakim dalam tindak pidana ta'zir berhak memilih hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana ta'zir yang dilakukan terpidana, dengan syarat hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan pelaku, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan hukuman yang ingin dicapai. Dalam tindak pidana hudud dan qishash/diat, hakim tidak mempunyai hak pilih dalam menentukan hukumannya.

³⁵ Ibid.

- e. Dari segi keringanan hukuman. Dalam tindak pidana hudud tidak berlaku dispensasi untuk meringankan hukuman dari yang telah ditetapkan syara'. Dalam tindak pidana pembunuhan keringanan hukuman bisa berlaku dari pihak korban atau ahli warisnya, yaitu dengan menggugurkan hukuman qishash dan menggantinya menjadi hukuman diat. Adapun dalam tindak pidana ta'zir, hakim berhak sepenuhnya memberikan keringanan hukuman terhadap pelaku, apabila dalam hal tersebut ada kemaslahatan yang menghendakinya.³⁶

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kepala Daerah Adalah orang yang mengepalai suatu daerah.³⁷ Di dalam Siyasah Islam, istilah Kepala Pemerintahan Daerah dikenal dengan istilah 'Amir, yang memiliki makna penguasa atau pemimpin. Sedangkan sistem kepemimpinannya disebut *Imarah* yang merupakan *mashdar* dari kata *Amira* yang berarti *keamiran* atau

³⁶ *Ibid.* h. 811.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),h. 671.

pemerintahan. *Imarah* dapat juga bermakna keimamahan atau kepemimpinan.³⁸

Istilah *Imarah*, yang berarti pemerintahan keamiran, sesungguhnya memilikinya kemiripan dengan istilah *Imamah*. perbedaanya terletak hanya pada lingkup kekuasaan dan wewenang, dimana dalam *Imamah* kekuasaan dan wewenangnya bersifat nasional, sementara *imarah* lebih bersifat lokal atau regional. Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, persoalan tentang pemerintahan daerah masuk dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³⁹

Manusia diciptakan sebagai pemimpin atau *khalifah* dimuka bumi, hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

الدِّمَآءَ وَحَنُ نُّسَبٍۭ یُّحْمَدُکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۛ﴾

³⁸Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.25

³⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), h. 47.

“ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”.

Quraish shihab di dalam *Tafsir Al-Misbah* mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia dimuka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memlihara, ada yang membimbingnya.⁴⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰى

اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Annisa 59

Ayat ini menunjukan ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kata *al-amr* dalam ayat

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume.I, Cet. Ke-II, h.140.

itu artinya urusan, persoalan, masalah perintah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utamanya dan kesibukan sehari-harinya yaitu mengurus persoalan rakyatnya, menyelesaikan problematika dan masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat serta memiliki wewenang dan mengatur, memenej dan menyuruh bawahan dan rakyat.

Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

2. Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Asas Pemilihan Kepala Daerah menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴¹ Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁴²

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

⁴¹Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, h.6.

⁴²*Ibid*, pasal 5, h.7.

- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

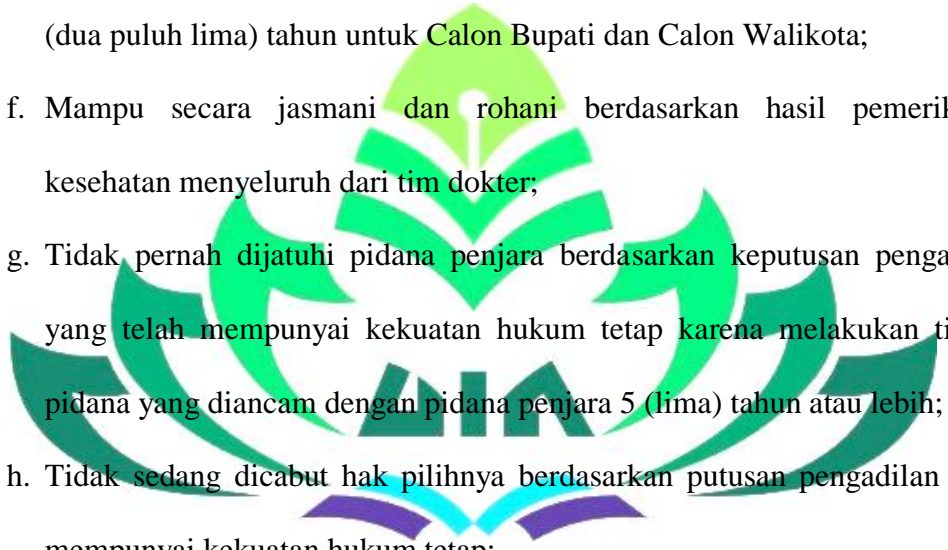
Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁴³

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. Pelaksanaan kampanye;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara;
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. Penetapan calon terpilih;
- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

3. Syarat-Syarat Menjadi Kepala Daerah

Persyaratan menjadi Kepala Daerah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:⁴⁴

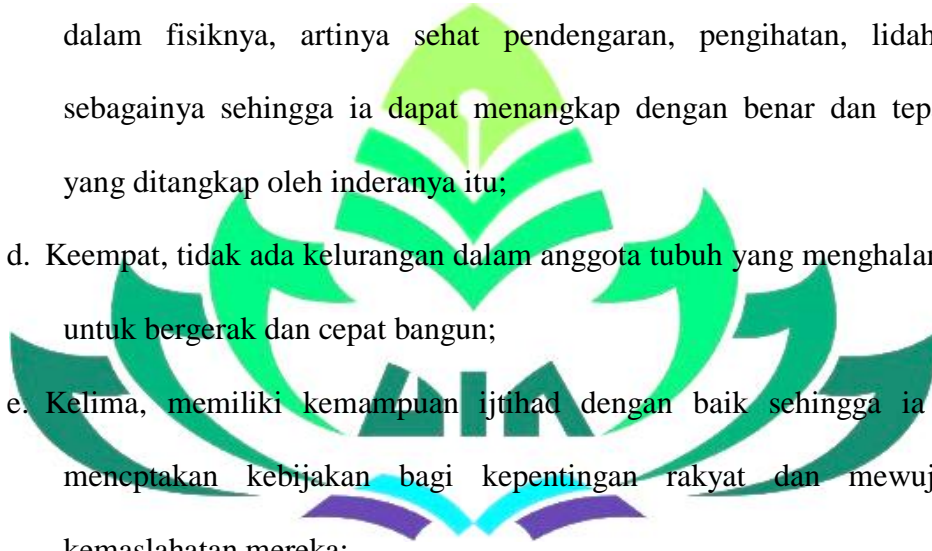
⁴³*Ibid.*

- 
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Telah mengikuti uji publik;
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

⁴⁴Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Pasal 7 (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, h.8.

- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Berhenti dari jabatan bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam pandangan Al-Mawardi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki tujuh syarat-syarat sebagai berikut:

- 
- a. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dengan segala persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum;
 - c. Ketiga, seorang pemimpin tidak cacat artinya tidak memiliki kekurangan dalam fisiknya, artinya sehat pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu;
 - d. Keempat, tidak ada kelurangan dalam anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun;
 - e. Kelima, memiliki kemampuan ijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka;
 - f. Keenam, memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh;
 - g. Ketujuh, seorang pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraish.⁴⁵

Persyaratan terakhir bahwa pemimpin harus dari suku Quraish memiliki diskusi panjang seiring perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah

⁴⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.256.

Ibnu Khaldun yang menginterpretasikan persyaratan tersebut bersifat kontekstual. Ibnu Khaldun menilai bahwa suku Quraish adalah suku yang paling maju dan dinilai paling representative untuk memimpin suku-suku lainnya. Hal yang harus diambil adalah kemajuan pemimpin tersebut dalam hal ilmu, visi, misi, dan karakter yang baik, bukan secara *litterlijk* melihat suku Quraish sebagai persyaratan.⁴⁶



BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIII/2015

⁴⁶Muhammad bin Khaldun Abdurrahman, *mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Pustaka Al Kautsar, 2011)

A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

Pemohon dalam permohonannya bertanggal 19 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 86/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada tanggal 25 Maret 2015, yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 April 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678), (bukti P-1 dan bukti P-2) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian Undang-Undang;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 3) Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

1. Tentang Pokok Perkara

Syarat menjadi Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh*

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, pasal tersebut menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-Undang Dasar”

- b. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

- c. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Bersama warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

- d. Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”

- e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- f. Pasal 28d ayat (3) berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

g. Pasal 28J ayat (2) berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratusan juta rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan yang sama. Sebagai perorangan maka kedudukan pemohon sebagai perseorangan warga negara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2. Pemohon dan Kepentingan Hukum

Para pemohon adalah perorangan yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku. Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” penerapan pasal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Berlakunya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi mantan terpidana dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang setiap periodeisasinya ketatanegaraan dalam keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan pengisian atas jabatan tersebut sehingga hak konstitusional pemohon dapat dipastikan potensial dilanggar atau dirugikan adanya persyaratan tersebut.

Berikut merupakan para pemohon yang mengajukan *Judicial Review*. Nama Jumanto, kewarganegaraan Indonesia. Beralamat domisili Dusun Siyem, RT. 01 RW. 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo. Jumanto selaku warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Jumanto saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Jumanto telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Probolinggo, namun dengan adanya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang diuji menjadi mustahil bagi Jumanto untuk mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Pemohon kedua yakni Fathor Rasyid, kewarganegaraan Indonesia. Alamat domisili Klosepuluh, RT. 20 RW. 05, Desa Klosepuluh, Sukodono, Sidoarjo. Fathor Rasyid merupakan warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9

November 2010. Dalam putusan tersebut pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun. Fathor Rasyid saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Fathor Rasyid saat ini juga bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Situbondo. Adanya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang diuji tersebut mustahil bagi pemohon untuk mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo.

Atas dalil pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 menurut Mahkamah Konstitusi pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan actual serta terdapat hubungan sebab akibat. Menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan tersebut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pokok Permohonan

Pokok Permohonan dalam hal ini adalah Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menentukan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- 2) Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan tersebut, dalam KUHP pencabutan hak pilih atau dipilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukum tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- 3) Berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Ditinjau dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup wajar sebagai WNI yang baik dan bertanggungjawab.

- 4) Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, diperkuat kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010 bahwa persyaratan calon kepala daerah telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi merupakan persyaratan administrative. Seluruh wilayah hukum RI berlaku tafsir baru, norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*.

- 6) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada telah mengakomodir Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, akan tetapi hal tersebut tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo. Mengakibatkan Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan.

7) Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya adalah orang yang menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian mantan narapidana yang bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

8) Syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yakni “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Adanya pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh publik sebagai pemilih, maka terpulang sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi K Nomor 4/PUU-VII/2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan karena yang bersangkutan telah berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang mantan narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

C. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengadili dan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945;
3. Meyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

BAB IV

ANALISIS

A. Dasar dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, atas dasar permohonan yang diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati Probolinggo dan Situbondo namun karena adanya ketentuan pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mungkin bagi Jumanto dan Fathor Rasyid mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang mantan narapidana dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah ternyata terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pada Undang-Undang No. 08 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah salah satu persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Pada tahun 2016 Undang-Undang tentang

Pemilihan Kepala Daerah telah mengalami pembaharuan, dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Salah satu pasal yang diperbaharui yaitu pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” Dan pasal 7 ayat (2) berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 42/PUU-XIII/2015 didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, keterangan ahli yang diajukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat.

Menurut penulis apabila seseorang telah menjalani penjara atau pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan

Indonesia yang gagal. Artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal. Namun juga tidak dipungkiri bahwasannya pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya masih berpegang teguh pada etika kusilaan, sehingga walaupun mantan narapidana tersebut telah menjalani hukuman secara hukum negara tetapi juga tetap mengalami hukuman moral dari masyarakat. Dimana status mantan narapidana tersebut masih sulit diterima dikalangan masyarakat. Yang mana seorang mantan narapidana walaupun telah selesai menjalani masa tahanan masih dianggap cacat moral.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang di tunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu dalam realita kehidupan manusia harus didasari pada Al-Qur'an dan Hadist. Karena Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang meletakkan dasar dan prinsip umum hukum Islam. Demikian pula dengan Sunnah/Hadist yang menjadi dasar hukum Islam.

Berdasarkan pandangan ini, maka manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai individu dihadapan Tuhan-Nya, tanpa

memungkinkan untuk mendelegasikannya kepada pribadi yang lain. Mempunyai pertanggung jawaban dari seseorang haruslah didahului oleh kebebasan memilih. Tanpa adanya kebebasan itu lantas dituntut dari padanya pertanggung jawaban adalah suatu kezaliman dan ketidakadilan yang jelas hal itu bertentangan sekali dengan sifat Allah yang Maha Adil.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمٌ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Allah memerintahkan para *umara* (penguasa) menunaikan amanat kehakiman peradilan dengan menetapkan hukum dan memutuskan perkara diantara manusia dengan adil, baik dalam masalah darah, harta, kehormatan, hal kecil maupun besar. Begitu juga kepada kerabat maupun bukan kerabat, kawan maupun lawan dan orang baik maupun jahat termasuk juga kedalam amanat ini, keadilan dari pihak pemerintah sebagai satu amanat yang mesti

dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Adil disini dimaksud mengikuti syariat Allah melalui lisan Rasulullah Saw seperti dalam masalah ahkam (hukum) maupun hudud. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui keadilan itu agar dapat memutuskan dengan keadilan.

Sesungguhnya Allah SWT bersama hakim selagi ia tidak aniaya. Apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah meyerahkan dia kepada dirinya sendiri (menjauh darinya). Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang diolok-olok. Jadi janganlah kita mencap seseorang yang pernah melakukan kejahatan atau mantan narapidana sebagai orang yang tidak baik padahal mereka telah menjalani masa hukumannya, karena belum tentu kita lebih baik dari padanya begitupun sebaliknya.

Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman dan jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin maka kalimat itu harus diberi tanggapan yang baik dan jangan sekali-kali timbul salah paham apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka.

Konsep Siyasah Dusturiyah merupakan dari fiqh siyasa yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan, mereka semuanya mempunyai hak yang sama yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk juga hak mantan narapidana. Siyasah Dusturiyah yang

membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sebab tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut penulis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi Kepala Daerah dengan syarat tertentu berarti telah mengembalikan hak-hak seorang mantan narapidana salah satunya hak politik agar mantan narapidana dapat ikut berpartisipasi dalam politik. Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, dan agama maupun status sosial dalam masyarakat, sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat. Jadi seorang mantan narapidana dapat menjadi Kepala Daerah jika ia benar-benar telah bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang sama secara berulang serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi no.42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah masih mengacu kepada tafsir putusan Mahkamah Konstitusi no. 04/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 42/PUU-XIII/2015 terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 7 huruf g Undang-Undang no 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dengan syarat tertentu dengan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada UUD 1945, yakni pada pasal 27 ayat (1), 28C ayat (1), 28D ayat (1) dan (3)
2. Berdasarkan kajian hukum Islam putusan Mahkamah Konstitusi no. 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang mencakup hak-hak umat sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam Islam yang harus dilindungi hak-haknya apabila telah bertaubat.

B. Saran-saran

1. Saran dari penulis untuk semua kalangan masyarakat diharapkan untuk dapat menerima seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani

hukumannya dan kembali kemasyarakat, karena seorang mantan narapidana juga memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya.

2. Saran dari penulis untuk masyarakat, agar dapat lebih selektif dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon kepala daerah.
3. Saran dari penulis untuk mantan narapidana, diharapkan untuk tidak melakukan tindak pidana kembali tetapi apabila diketahui melakukan tindak pidana kembali maka hak politiknya harus dicabut atau diberikan hukuman tanpa melihat dari segi ketentuan akibat hukum bagi mantan narapidana.
4. Saran dari penulis, bukan hanya mantan narapidana ini mendapatkan hukuman tambahan tetapi juga harus ada aturan yang lebih tegas mengenai pengawasan terhadap mantan narapidana yang diperbolehkan mencalonkan diri kembali. Contoh mengenai soal laporan secara periodik kekayaan yang ia miliki kepada aparat penegak hukum, demikian juga alat-alat komunikasi yang dimiliki mantan narapidana tersebut secara terus-menerus oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Gunung Djati Press, Bandung, 2000.
- Amirudin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Kautun, Ranny, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung, 2000.
- Mansur, Ahmad, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1989.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2006.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali

Pers, Jakarta, 1985.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Citra Umbara, Bandung, 2015.

Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015, Citra Umbara, Bandung, 2015.

Widjaja. A.W, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA,

Jakarta,1998.

